PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN MEDONO KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MISBAHUS TSANI

NIM : 1519063

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2026

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PENANGANAN SAMPAH DI KELURAHAN MEDONO KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD MISBAHUS TSANI

NIM : 1519063

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Misbahus Tsani

NIM : 1519063

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Good Governance Pada Penanganan Sampah Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



Pekalongan, 02 Juli 2026

Yang Menyatakan,

Muhammad Misbahus Tsani

NIM. 1519063

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Misbahus Tsani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Misbahus Tsani
NIM : 1519063
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Good Governance Pada Penanganan Sampah Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya,. Atas perhatianya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2026
Pembimbing,

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Misbahus Tsani
NIM : 1519063
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Good Governance Pada Penanganan Sampah Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mu[illegible] S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 19860916201903101[illegible]

Pekalongan, 05 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. Machfur, M.Ag
NIP. 19[illegible]062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)

ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: **جماعة** ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: **كرامة الأولياء** ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (′)

Contoh: أأنتم ditulis a′antum مؤنث ditulis mu′annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

   Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu dan Bapak Tercinta, Ibu Uswatun Khasanah, Bapak Abdul Munir, Garda terdepan yang tidak pernah lelah mengetuk pintu langit demi kelancaran langkahku. Terima kasih atas doa-doa yang mengalir di sepertiga malam, air mata yang disembunyikan, dan kasih sayang tanpa syarat yang menjadi bahan bakar utama saya untuk terus melangkah ketika dunia terasa begitu berat. Karya kecil ini adalah persembahan awal untuk senyum bangga di wajah Ibu dan Bapak.
2. Paman Ahmad Tubagus Surur, Zuhrufus Surur, Nur Khabiba. Terima kasih telah menjadi kompas yang selalu mengarahkan saya ke jalur yang benar. Dukungan moral, waktu, dan setiap wejangan berharga yang Paman berikan sangat berarti bagi perjalanan akademis saya. Hingga Sampai di Titik ini,
3. Untuk Nenek tercinta, Siti Ti'satun, Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan doa tulus yang tidak pernah putus untuk cucumu ini. Keberhasilan mencapai gelar ini tidak lepas dari restu dan cinta yang Nenek tanamkan. Dedikasi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan bakti saya kepada Nenek.
4. Untuk Kakak dan Adikku, Hadziqotun Nisa, Muhammad Nafi Azami, Amanaturrohimah. Terima kasih telah berjalan beriringan bersamaku. Dukungan moral, bantuan-bantuan kecil, dan canda tawa yang kalian berikan secara tidak langsung menjadi energi tambahan bagiku untuk bertahan hingga titik terakhir ini.
5. Untuk dosen pembimbing Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum,Terima kasih atas dedikasi, bimbingan, dan ilmu bermanfaat yang telah diberikan selama

masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Arahan dan motivasi dari Bapak adalah lentera yang menuntun saya menyelesaikan tantangan akademis ini dengan baik.

MOTTO

"Atas izin Allah, doa Ibu Bapak yang tiada putus, serta pundak yang menolak untuk menyerah, akhirnya langkah ini sampai pada tujuannya."

ABSTRAK

Tsani, Muhammad Misbahus. 2026. Penerapan Prinsip Good Governance Pada Penanganan Sampah Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Kondisi darurat sampah di Kota Pekalongan yang dipicu oleh penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu pada awal tahun 2025 menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, khususnya di Kelurahan Medono. Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, implementasinya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konstruksi hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 serta bagaimana strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengelolaan sampah serta menjelaskan strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan doktrin para ahli. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum mengenai pembagian kewenangan, strategi, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasinya di Kelurahan Medono belum berjalan optimal karena penutupan TPA Degayu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Strategi pengelolaan sampah berdasarkan prinsip *good governance* juga belum terlaksana secara maksimal. Meskipun pemerintah kelurahan telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi, pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, dan respons pemerintah yang masih bersifat reaktif terhadap kondisi darurat sampah.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan Sampah, Kelurahan Medono, Strategi Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Tsani, Muhammad Misbahus. 2026. *The Implementation of Good Governance Principles in Waste Management in Medono Urban Village, Pekalongan City*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The waste emergency in Pekalongan City, triggered by the closure of the Degayu Final Disposal Site (TPA) in early 2025, has caused various problems in waste management, particularly in Medono Urban Village. Although Pekalongan City Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Waste Management and Pekalongan Mayor Regulation Number 18 of 2022 concerning Regional Policies and Strategies for Household Waste Management have been enacted, their implementation has not yet been optimal. This study addresses two research questions: (1) how is the legal construction of waste management based on Pekalongan Mayor Regulation Number 18 of 2022, and (2) how is the waste management strategy in Medono Urban Village implemented based on the principles of good governance. *Accordingly, this study aims to analyze the legal construction of waste management and to examine the waste management strategy in Medono Urban Village from the perspective of* good governance *principles.*

This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach. Primary data were collected through observations and interviews, while secondary data were obtained through a literature review consisting of legislation, books, academic journals, and legal doctrines. The data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings indicate that the legal construction of waste management under Pekalongan Mayor Regulation Number 18 of 2022 provides a legal framework for the distribution of authority, strategies, and responsibilities of the local government in waste management. However, its implementation in Medono Urban Village has not been optimal due to the closure of the Degayu Final Disposal Site (TPA), limited facilities and infrastructure, and inadequate coordination between the government and the community. Furthermore, the waste management strategy based on the principles of good governance *has not been fully implemented. Although the village administration has sought to apply the principles of transparency, accountability, rule of law, equity, responsiveness, effectiveness, and efficiency, its implementation is still constrained by low community participation, weak supervision, and the government's reactive response to the waste emergency.*

Keywords: Good Governance, *Waste Management, Medono Urban Village, Waste Management Strategy.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Medono Kota Pekalongan". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan medono kota pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang

7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .. Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI v
PERSEMBAHAN..... viii
MOTTO x
ABSTRAK xi
***ABSTRACT* ..... xii**
KATA PENGANTAR..... xiii
DAFTAR ISI.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teoritik 6
F. Penelitian Yang Relevan..... 9
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 19
BAB II Error! Bookmark not defined. **TEORI GOOD GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH.....**Error! Bookmark not defined.
A. Good Governance .....**Error! Bookmark not defined.**
B. Kebijakan Publik.....**Error! Bookmark not defined.**
C. Strategi Pengelolaan Sampah.....**Error! Bookmark not defined.**
BAB III STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA PEKALONGAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Profil Kota Pekalongan .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Profil Kelurahan Medono Kota Pekalongan .....**Error! Bookmark not defined.**

3. Kondisi Darurat Sampah di Kota Pekalongan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Gambaran Umum Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Strategi Pengelolaan Sampah oleh Pemerintahan Kelurahan Medono Kota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga .....**Error! Bookmark not defined.**

1. Strategi Pengolahan Sampah.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Strategi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MEDONO BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* STUDI KASUS DARURAT SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN .....Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono pada Kondisi Darurat Sampah .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pekalongan saat ini menghadapi kondisi darurat sampah yang memprihatinkan. Situasi ini bermula dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu pada awal tahun 2025. Menurut laporan kajian persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021, menyebutkan bahwa TPA Degayu merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir yang ada di Kota Pekalongan. TPA Degayu ini adalah TPA utama yang menampung limbah dari Kota Pekalongan dengan luas 5,8 hektar dan daya tampung idealnya berkisar 740 ribu meter kubik.[1] Lahan efektif yang sudah terpakai di TPA adalah 5 Ha dari kapasitas efektif totalnya sebesar 5,8 Ha. Jumlah tersebut menunjukan bahwa di tahun 2021 sekitar 86% sampah sudah memenuhi TPA. Kondisi volume sampah pada TPA Degayu juga sudah melebihi daya tampung ideal yaitu sebesar 1.160.000 m². Selain itu, pada TPA eksisting dinilai tidak sesuai karena letaknya cukup dekat dengan permukiman yaitu < 500 meter dan badan air sejauh < 100 meter.[2]

Penutupan TPA ini dilakukan karena kondisi overkapasitas dan tekanan regulasi nasional yang menuntut penghentian praktik *open dumping*. Penghentian praktik *Open dumping* ini di karenakan *open dumping* dianggap sebagai faktor utama pencemaran lingkungan yang serius mulai dari sejumlah empat komponen lingkungan dengan risiko tinggi yaitu pencemaran udara, berkurangnya estetika lingkungan, pencemaran air tanah dan pencemaran air permukaan.[3] Namun, tanpa adanya alternatif penanganan sampah yang siap dan terencana, penutupan ini justru memicu krisis baru. Tumpukan sampah kini

---

[1] Geo Mapid. *Menjawab tantangan lokasi TPA di Pekalongan: GIS sebagai solusi berbasis data*. Diakses tanggal 2 Oktober 2025 dari https://geo.mapid.io/blog_read/menjawab-tantangan-lokasi-tpa-di-pekalongan-gis-sebagai-solusi-berbasis-data.

[2] Raden Roro Kingkin Maharani, Arief Laila Nugraha, and Hana Sugiastu Firdaus, "Analisis Kesesuaian Lahan Peruntukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis," *Jurnal Geodesi Undip* 13, no. 1 (2024): 42.

[3] Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, and Muhammad Abdus Salam Jawwad, "Dampak Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping) Terhadap Kualitas Udara Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Gohong," *Jurnal Envirotek* 15, no. 1 (2023): 35.

terlihat di berbagai sudut kota, termasuk di jalanan, hingga fasilitas publik. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Medono di Kecamatan Pekalongan Barat. Tidak adanya sistem pembuangan yang memadai membuat masyarakat terpaksa membuang sampah rumah tangga secara sembarangan, sehingga memperparah pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan publik.

Dua tahun sebelumnya, Pemerintah Kelurahan Medono telah berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga berbasis prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*). Sayangnya, program tersebut tidak berjalan efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya dukungan infrastruktur seperti bank sampah, serta tidak adanya pengawasan atau tindak lanjut yang berkelanjutan dari pihak kelurahan.[4] Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan sosialisasi semata, tetapi memerlukan sistem yang terintegrasi serta sinergi antara pemerintah dan warga. Di sinilah penting untuk melihat pengelolaan sampah dalam bingkai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap kebijakan publik, termasuk urusan kebersihan lingkungan.

Sebagai perbandingan, Kota Surabaya dapat dijadikan contoh sukses dalam penanganan sampah. Kota ini berhasil menurunkan volume sampah secara signifikan melalui penerapan program 3R yang masif di tingkat rumah tangga. Surabaya membentuk bank-bank sampah di tiap kelurahan,[5] mengembangkan tempat daur ulang mandiri, hingga mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi produk bernilai jual. Bahkan, pemerintah kota juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang

[4] Muhammad Misbahus Tsani, Wawancara dengan masyarakat kelurahan Medono, 17 Februari 2026

[5] Elis Viranda, Rachmawati Novaria, and Adi Soesiantoro, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penerapan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 4 (2024): 197.

mampu mengolah hingga 7 ton sampah per hari menjadi energi listrik.[6] Kunci keberhasilan Surabaya terletak pada kebijakan yang konsisten, partisipasi aktif masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, Kota Cilegon juga menunjukkan inovasi luar biasa dengan mengembangkan teknologi pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang digunakan untuk *co-firing* PLTU Batu Bara.[7] Inovasi ini tak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberi kontribusi terhadap transisi energi bersih, hingga menarik perhatian Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang, untuk menjalin kerja sama.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kolaboratif dan berbasis prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan sampah yang efektif sangat mungkin diwujudkan, bahkan di tingkat kelurahan. Berbeda dengan Surabaya dan Cilegon, Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan besar karena belum adanya sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, serta lemahnya integrasi antara perencanaan lingkungan dan prinsip pemerintahan yang baik.

Padahal permasalahan penanganan sampah di Kelurahan Medono tidak hanya berkaitan dengan penutupan TPA Degayu, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan pengelolaan sampah dengan pelaksanaannya di lapangan. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 telah memberikan arah kebijakan dan pembagian tanggung jawab dalam pengurangan serta penanganan sampah, tetapi pelaksanaannya di Kelurahan Medono masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

---

[6] Felia Nanda Putri, Benny Bintarjo, and Suko Istijanto, "Pengembangan Sistem Kapasitas PLTSa Di TPA Benowo Surabaya Dengan Pendekatan Wisata Edukasi," *Jurnal Teknik Mesin Dan Manufaktur (JTMM)* 6, no. 2 (2024): 55.

[7] Trisno Widayat et al., "Pemanfaatan Limbah Non B3 (Sampah) Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (Bbjp) Untuk Co-Firing Pltu Banten 1 Suralaya Dalam Rangka Pengembangan Dan Peningkatan Circular Ekonomi Masyarakat Di Kota Cilegon," *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 10 (2024): 3774.

Kondisi tersebut semakin kompleks karena pengawasan terhadap pembuangan sampah belum berjalan secara maksimal dan penegakan aturan masih cenderung berupa teguran lisan, sedangkan respons pemerintah terhadap timbulan sampah lebih banyak dilakukan setelah munculnya persoalan di lapangan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah belum sepenuhnya dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, persoalan utama yang perlu dikaji bukan hanya mengenai keberadaan sampah dan keterbatasan tempat pembuangan, tetapi juga mengenai bagaimana strategi pemerintah Kelurahan Medono dalam melaksanakan penanganan sampah serta sejauh mana strategi tersebut telah mencerminkan prinsip good governance.

Berdasarkan kondisi tersebut, sangat penting untuk mengkaji ulang pengelolaan sampah di Kota Pekalongan terutama di Kelurahan Medono. Sebab dengan mengkaji lingkup pemerintahan terkecil dapat untuk melihat masalah secara lebih konkret dan spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang ada dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup kelurahan. sehingga, peneliti akan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Good Governance Pada Penanganan Sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan**"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga?
2. Bagaimana Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono Berdasarkan Prinsip *Goood Governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Konstruksi Hukum Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Untuk Menjelaskan Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono Berdasarkan Prinsip *Goood Governance*.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mencapai tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih mendalam terkait strategi pengelolaan sampah di kelurahan Medono berdasarkan prinsip *good governance*. Kegunaan yang dapat diberikan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis merupakan kegunaan penelitian hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam rumpun ilmu Hukum Tata Negara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan akademis mengenai penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya pada penanganan sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kelurahan dalam penanganan sampah berdasarkan prinsip good governance.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih manfaat secara praktis, diantaranya:

   a. Bagi Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

      Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi mengenai penerapan prinsip *good governance* pada penanganan sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Hukum Tata Negara dalam memahami penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kelurahan pada penanganan

sampah, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema sejenis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penerapan prinsip good governance pada penanganan sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dan tanggung jawab bersama dalam penanganan sampah, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pemerintah kelurahan dalam mengatasi permasalahan sampah dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan tertata.

E. Kerangka Teoritik

1. Good Governance

Berdasarkan penjelasan dari A. Junaedi Karso dalam buku nya Good Governance istilah good governance berasal dari bahasa Inggris yang bermakna tata kelola pemerintahan yang baik.[8] Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson sekitar 125 tahun yang lalu. Dalam pandangannya, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik.[9] Gagasan tersebut memperoleh respons positif dari kalangan akademisi dan pada perkembangan selanjutnya mengalami penguatan hingga berkembang menjadi suatu bidang kajian ilmiah.

Good governance tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.[10] Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efisiensi menjadi pilar utama dalam penerapan *good governance*. Melalui prinsip-prinsip tersebut,

[8] A. Junaedi Karso, *Good Governance* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 4.
[9] Karso, 4.
[10] Ocran Radyan Danar, *Teori Good Governance* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 12.

pemerintah diharapkan mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.[11]

Selain itu, perkembangan *good governance* juga memiliki keterkaitan erat dengan proses demokratisasi. Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan good governance berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, implementasi good governance menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.[12]

2. Kebijakan Publik

Awan Abdoellah dan Yudi Rusfiana menjelaskan dalam buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik bahwa kebijakan publik menurut James E. Anderson merupakan suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor sebagai respons terhadap adanya suatu persoalan yang sedang dihadapi dalam masyarakat.[13] Kebijakan publik bukanlah serangkaian keputusan yang bersifat spontan, melainkan merupakan hasil dari proses yang sadar, terencana, dan memiliki tujuan tertentu.[14] Dengan demikian, kebijakan tidak sekadar menjadi bentuk reaksi terhadap masalah, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara luas. Pandangan ini mempertegas bahwa dalam setiap kebijakan terdapat dimensi intensionalitas (kesengajaan) dan rasionalitas, di mana aktor kebijakan berupaya mencapai tujuan tertentu melalui instrumen kebijakan yang dipilih.

Senada dengan Anderson, Awan dan Yudi mengutip penjelasan Solichin Abdul Wahab dalam bukunya, di mana Wahab menegaskan bahwa kebijaka memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari bentuk keputusan lainnya. Salah satu ciri mendasar adalah bahwa kebijakan disusun dan

---

[11] Abdul Kahar Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 11 (2022): 929, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474.

[12] Khairudin, Soewito, and Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Governance Di Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Amerta Media, 2021).

[13] Awan Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Jatinangor: Penerbit Alfabeta Bandung, 2016).

[14] Abdoellah and Rusfiana.

ditetapkan oleh aktor-aktor yang memiliki legitimasi dalam sistem politik. Aktor-aktor ini dapat berupa pejabat pemerintah, hakim, pemimpin adat, atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki kewenangan formal atau simbolik dalam mengatur urusan publik.[15] Oleh karena itu, kebijakan publik bersifat otoritatif dan mengikat, karena bersumber dari entitas yang memiliki kapasitas untuk memberlakukan norma dan aturan. Wahab juga menekankan bahwa kebijakan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan kolektif masyarakat, serta menjadi alat utama bagi negara atau otoritas lokal dalam mengarahkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi di wilayah yurisdiksinya.

3. Strategi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan penjelasan Ranno Marlany Rachman, strategi pengelolaan sampah merupakan serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas. Strategi tersebut mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pendaurulangan, hingga pembuangan akhir sampah sebagai satu kesatuan pengelolaan yang bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.[16] Proses ini mencakup serangkaian tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah. Masing-masing tahap memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam setiap tahap sangat menentukan kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat secara umum.

Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan estetika kawasan pemukiman. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran udara, tanah, dan air,

---

[15] Abdoellah and Rusfiana.

[16] Ranno Marlany Rachman et al., *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi Dan Implementasi)* (Makassar: CV. Tohar Media, 2019).

serta menjadi tempat berkembangbiaknya vektor penyakit. Selain itu, tumpukan sampah di ruang publik juga menurunkan kualitas visual lingkungan, mengganggu kenyamanan, dan merusak citra suatu wilayah.[17] Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah modern menekankan pendekatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari produsen, konsumen, hingga pemerintah sebagai penyusun kebijakan. Pemilahan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang, serta penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

No.	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3r (*Reuse, Reduce, Recycle*) Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara[18]	Metode penelitian yang digunakan ialah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat oleh pemerintah desa	Persamaan : kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada pemerintahan lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Baik pemerintah desa di Desa Bentek

[17] Adinda Ismail Putri et al., "Program Penanggulangan Sampah Oleh Mahasiswa KKN Tematik Universitas Pekalongan Di Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 5 (2025): 2075.

[18] Syaiful Sibun, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3r (Reuse, Reduce, Recycle) Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara," *Universitas Muhammadiyah Mataram* (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

		bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui TPS 3R dengan menerapkan konsep *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3R), sehingga berbagai jenis sampah, terutama sampah taman, sampah kemasan, sampah plastik, serta sampah organik, dapat didaur ulang. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah didukung oleh pendekatan berbasis masyarakat, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.	maupun pemerintah kelurahan di Medono diharapkan dapat mengambil peran penting dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah. Perbedaan: Meskipun sama-sama berfokus pada pengelolaan sampah di tingkat pemerintahan lokal, terdapat perbedaan dari segi konteks, tujuan, dan pendekatan antara kedua penelitian. menjadikan penelitian peneliti lebih berfokus pada evaluasi kebijakan dalam kondisi darurat dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2.	Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro[19]	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah	Persamaan: Kesamaan berada pada objek kajian utama yaitu hukum terkait pengelolaan sampah Perbedaan:

[19] Cici Firliana, "Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Metro" (IAIN Metro, 2024).

		melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain kurang efektifnya komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perhatian dan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar pengelolaan sampah dapat terlaksana secara lebih efektif.	Dalam penelitian peneliti lebih menekankan terhadap peranan dari pemerintah kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi darurat sampah di kota Pekalongan.
3.	Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)[20]	Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan sampah belum terlaksana	Persamaan: Kesamaan berada pada objek kajian utama yaitu hukum terkait pengelolaan sampah Perbedaan: Dalam penelitian peneliti lebih

[20] Muhammad Fauzarrahman Yusuf, "Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar)" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

		secara optimal, yang ditandai dengan kurang efektifnya proses pengangkutan sampah serta rendahnya kedisiplinan petugas satuan tugas (satgas). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu lemahnya komunikasi antara RT, RW, dan pihak kelurahan, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan warga mengenai sistem pengelolaan sampah, serta belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengelolaan sampah.	menekankan terhadap peranan dari pemerintah kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi darurat sampah di kota Pekalongan.
4.	Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo[21]	Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. asil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup lebih banyak diterapkan melalui sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis. Selain itu, penelitian	Persamaan: Kesamaan berada pada objek kajian utama yaitu hukum terkait pengelolaan sampah Perbedaan: Dalam penelitian peneliti lebih menekankan terhadap peranan dari pemerintah kelurahan dalam

[21] Reynaldi Otvaianus.S, "Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

		ini juga menemukan bahwa pengaturan mengenai penegakan hukum di bidang persampahan masih terbatas karena belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.	melakukan pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi darurat sampah di kota Pekalongan.
5.	Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Makassar[22]	Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah spesifik di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011, yang mengatur larangan mencampurkan sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan, informasi, serta pembinaan mengenai pengelolaan persampahan, dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui lembaga yang dibentuk oleh RT/RW dari TPS atau TPST hingga TPA. Sementara itu, limbah spesifik yang berasal dari fasilitas pelayanan	Persamaan: Kesamaan berada pada objek kajian utama yaitu hukum terkait pengelolaan sampah Perbedaan: Dalam penelitian peneliti lebih menekankan terhadap peranan dari pemerintah kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi darurat sampah di kota Pekalongan.

[22] Ahmad Fikri, "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik Di Kota Makassar" (Universitas Hasanudin, 2022).

		kesehatan dikelola secara mandiri oleh lembaga yang berwenang. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pengelolaan sampah spesifik dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, pewadahan dan penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, pengaturan perizinan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, serta kebijakan pengelolaan limbah B3.	

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat diketahui bahwa penelitian peneliti memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Di mana peneliti lebih fokus terhadap peranan dari pemerintah kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah sebagai upaya mengatasi darurat sampah di kota Pekalongan. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian peneliti merupakan penelitian terbaru yang tidak memiliki kesamaan mutlak dengan penelitian lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris, Penelitian hukum Empiris merupakan salah satu motede penelitian hukum yang meneliti hukum dengan cara dijadikan sebagai konsep dalam suatu norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.[23] Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan

[23] Muktia Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

masyarakat dalam berperilaku. Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan Medono Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

   Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih terfokuskan kepada suatu permasalahan yang mengarah pada generalisasi.[24] Pendekatan ini mengadopsi analisis mendalam *(in-dept analysis)* di mana masalah akan diteliti secara individual sesuai dengan kasusnya, sebab pendekatan kualitatif meyakini bahwa setiap masalah akan memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan pada teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencangkup data primer dan data sekunder. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan Medono Kota Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

   Peneliti memilih Kelurahan Medono sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah di Kota Pekalongan yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Degayu. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan strategi pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah kelurahan dan masyarakat, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kelurahan Medono juga telah memiliki upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi pemilahan sampah, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Medono relevan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sampah serta melihat kesesuaian antara kebijakan pengelolaan sampah dengan pelaksanaannya di tingkat kelurahan.

---

[24] T Erwinsyahbana, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018, 1–21,

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui penelitian lapangan yang berasal dari observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian hukum dapat diketahui sebagai data yang berbentuk perilaku hukum dari masyarakat.[25] Pada penelitian ini data primer bersumber pada observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari narasumber yang berada di Kelurahan Medono yaitu lurah kelurahan Medono. Sehingga nantinya, dapat membantu peneliti dalam memahami tinjauan hukum penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan Medono Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau biasa disebut juga dengan data kepustakaan, yang mana dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum. berbentuk seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari pada ahli peneliti hukum,[26] bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

[25] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020).

[26] Nugroho, Haryani, and Farkhani.

5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah;
6) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal mendukung untuk memehami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

1) Sumber literatur berupa buku, jurnal,artikel, dan website yang memuat materi mengenai penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan Medono Kota Pekalongan.
2) Doktrin dari para pakar hukum mengeni kajian terkait strategi pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.

5. Teknik Pengunpulan Data

a. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan observasi di Kelurahan Medono Kota Pekalongan.

b. Wawancara

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Lurah Kelurahan Medono, Kota Pekalongan sebagai narasumber yang memiliki pengetahuan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Pemilihan Lurah Kelurahan Medono sebagai narasumber didasarkan pada kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan yang memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, serta permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Medono. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data interaktif adalah model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Hubermen[27]. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri atas empat tahapan sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip good governance pada pengelolaan sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan. Data yang dikumpulkan meliputi strategi pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan prinsip good governance dalam pengelolaan sampah.

2) Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah informasi yang relevan mengenai penerapan prinsip good governance pada pengelolaan sampah di Kelurahan Medono, sehingga analisis dapat difokuskan pada permasalahan yang diteliti.

3) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Data disajikan berdasarkan fokus penelitian, meliputi pelaksanaan pengelolaan sampah, strategi pemerintah kelurahan, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi. Penyajian ini bertujuan memudahkan peneliti dalam

[27] Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

memahami kondisi pengelolaan sampah dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan di lapangan.

4) Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dilakukan dengan menafsirkan dan menganalisis data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan penerapan prinsip good governance pada pengelolaan sampah di Kelurahan Medono Kota Pekalongan, termasuk kendala yang dihadapi serta kesesuaian antara kebijakan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan. Simpulan diperiksa kembali berdasarkan data yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan temuan penelitian.

Peneliti menyeleksi data yang sudah terkumpul untuk memudahkan dalam melakukan penelitian yang mendalam mengenai penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan sampah di kelurahan Medono Kota Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian, berupa bentuk dari hasil penelitian tentang Konstruksi Hukum Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono Berdasarkan Prinsip *Goood Governance.*

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Konstruksi Hukum Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali

Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.dan Strategi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Medono Berdasarkan Prinsip *Goood Governance*.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konstruksi hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang mengatur arah kebijakan, strategi, serta pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan tersebut menempatkan pemerintah daerah, perangkat kelurahan, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Namun, implementasinya di Kelurahan Medono belum berjalan secara optimal karena masih terkendala penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Degayu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta respons pemerintah yang masih bersifat reaktif terhadap kondisi darurat sampah. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya ditinjau dari aspek hukum, tetapi juga menggunakan perspektif good governance sehingga mampu menggambarkan kesesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada Kelurahan Medono sehingga hasil penelitian belum

dapat menggambarkan kondisi pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kelurahan Medono berdasarkan prinsip good governance sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan

   Pemerintah kota perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir, melainkan mengembangkan alternatif pengelolaan berbasis teknologi dan pengolahan di sumber. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi agar Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 dapat berjalan lebih operasional di tingkat kelurahan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan Medono

   Pemerintah kelurahan perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkelanjutan. Penguatan koordinasi dengan RT dan RW juga perlu ditingkatkan agar distribusi informasi dan pengawasan di lapangan lebih efektif. Selain itu, pengembangan inovasi lokal seperti bank sampah atau pengelolaan sampah berbasis komunitas perlu didorong sebagai solusi jangka panjang.

3. Bagi Masyarakat Kelurahan Medono

   Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat perlu lebih disiplin dalam mematuhi aturan kebersihan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada aspek lain seperti inovasi teknologi pengelolaan sampah atau membandingkan efektivitas pengelolaan sampah antar wilayah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengelolaan sampah berbasis *good governance* di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Awan, and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Jatinangor: Penerbit Alfabeta Bandung, 2016.

Afri, Lisa Dwi, Fauziah Mawaddah Harefa, Meri Muliani Hasibuan, Nazira Ananda, Putri Ramadani, and Wahyu Wahono. "Strategi Pengelolaan Sampah Yang Efektif Di Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Dan Perubahan Sosial* 1, no. 3 (2024): 66.

Arafat. *Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik*. Vol. 19. Malang: Literasi Nusantara, 2023.

Darmawan, Muhamad, Muhammad Rifqy, Addin Athalla, and Onma Bryan Yehezkiel. "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi." *Journal of Social Contemplativa* 3, no. 1 (2025): 13.

Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 336.

Fikri, Ahmad. "Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik Di Kota Makassar." Universitas Hasanudin, 2022.

Firliana, Cici. "Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Di Kota Metro." IAIN Metro, 2024.

Hasan, Afiq Fahmi, and Muhammad Fakhrizal Rizky Ferlanda. "Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan." Semarang, 2025.

Hasriani. "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Jurnal Publisitas* 10, no. 2 (2024): 188.

Karso, A. Junaedi. *Good Governance*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Khairudin, Soewito, and Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Governance Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Amerta Media, 2021.

Kimbal, Rahel W, and Clarita Sehat Ropindo Iroth. “Strategi Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kesadaran Pengunjung Dalam Membuang Sampah Pada Tempatnya Di Kawasan Wisata Baru Rano Reindang.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 4 (2025): 4630.

Kristian, Indra. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 89.

Maharani, Raden Roro Kingkin, Arief Laila Nugraha, and Hana Sugiastu Firdaus. “Analisis Kesesuaian Lahan Peruntukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis.” *Jurnal Geodesi Undip* 13, no. 1 (2024): 42.

Maranjaya, Abdul Kahar. “Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan.” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 11 (2022): 929–41. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474.

Marfuah. “Efektivitas Dan Fungsi Hukum Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *Desiderata: Law Review* 1, no. 2 (2024): 38.

Marwiyah, Siti. *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Impelementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Probolinggo: Mitra Ilmu, 2022.

Mutmainnah, Lina, M. Ridwan Basalamah, and Eris Dianawati. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima” 13, no. 01 (2014): 1185–94.

Nafurbenan, Octavianus, Murshal Manaf, Rudi Latief, and Syafri. *Penanganan Dan Pengelolaan Persampahan*. Makassar: Chakti Pustaka, 2022.

Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal Education and Government Wiyata* 1, no. 1 (2023): 46.

Nurilhuda, Baskoro, Taufiq Bayu, Nur Rahmat, Sindy Mariska Ariyanti, Moh Zoelfikar Romicio, Khisna Alifah, Bayu Endro Priyono, et al. “Increasing Environmental Awareness Through Waste Management Practices in Bawuran Village.” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 595.

ocran Radyan Danar. *Teori Good Governance*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Otvaianus.S, Reynaldi. “Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup

Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, and Christina Yulita Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by Imam Nasima. Jakarta: LeIP, 2016.

Putri, Adinda Ismail, Agustina Ayu Prasyanti, Dian Fainani, Nadzifah Ziada Amalia, Putri Widianingrum, Ardiansyah Harno S, Yusup Mahendra, et al. "Program Penanggulangan Sampah Oleh Mahasiswa KKN Tematik Universitas Pekalongan Di Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 5 (2025): 2075.

Putri, Felia Nanda, Benny Bintarjo, and Suko Istijanto. "Pengembangan Sistem Kapasitas PLTSa Di TPA Benowo Surabaya Dengan Pendekatan Wisata Edukasi." *Jurnal Teknik Mesin Dan Manufaktur (JTMM)* 6, no. 2 (2024): 55.

Rachman, Ranno Marlany, Fathur Rahman Rustan, Dwi Ermawati Rahayu, Bastian Artanto Ampangallo, Syaiful, Armin Aryadi, Mansyur, et al. *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi Dan Implementasi)*. Makassar: CV. Tohar Media, 2019.

Roby, Gusti Ahmad, Reno Affrian, and Akhmad Berkatillah. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong." *Jurnal MSDM* 1, no. 1 (2024): 96.

Rusydi, Juliadi, and Rika Santina. "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Penelitian Hukum* 02, no. 1 (2023). https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064.

Sibun, Syaiful. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3r (Reuse, Reduce, Recycle) Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara." *Universitas Muhammadiyah Mataram*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.

Sinaga, Kariaman. "Dinamika Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pengembangan Wilayah Yang Berkelanjutan." *Publik Reform* 10, no. 2 (2023): 66–67.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penebit Qiara Media, 2019.

Sukarmawati, Yuliana, Restu Hikmah Ayu Murti, and Muhammad Abdus Salam Jawwad. "Dampak Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping) Terhadap Kualitas Udara Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Gohong." *Jurnal Envirotek* 15, no. 1 (2023): 35.

Sya'Bany, Raihan Nabil As, and Alifa Sulaihah. "Menggali Rahasia Sukses Manajemen Sampah Di Jerman : Strategi Penerapan Waste Seperation System Sebagai Role Model Bagi Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *JPIM:Jurnal Penelitian Ilmiah Multidispliner* 1, no. 3 (2025): 563.

Viranda, Elis, Rachmawati Novaria, and Adi Soesiantoro. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 4 (2024): 197.

Warawirin, Redemta, Maria R Hada, Antonius R Rehin, and K Albertus. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Prinsip Responsivitas." *Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntasnsi* 2, no. 2 (2025): 112.

Widayat, Trisno, Lac Hirna Wipogso, Achmad Soleh Nopizar, and Nenden Hasanah. "Pemanfaatan Limbah Non B3 (Sampah) Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) Untuk Co-Firing PLTU Banten 1 Suralaya Dalam Rangka Pengembangan Dan Peningkatan Circular Ekonomi Masyarakat Di Kota Cilegon." *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 10 (2024): 3774.

Widya Sari Ramadhani. "Strategi Efektif Dalam Pengelolaan Sampah Menuju Masyarakat Sadar Lingkungan." *LOKOMOTIF ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 32.

Yasin, Andi Sri Yusnani, Andi Anwar, Uni W Sagena, and Masjaya. "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17, no. 2 (2024): 411.

Yusmaman, Waringin Margi, Herri Widiyanto, Siti Nur Rohmah, and Muhammad

Ali. “Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan.” *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset Dan Inovasi Daerah Kota Surakarta* 2, no. 2 (2023): 89.

Yusuf, Muhammad Fauzarrahman. “Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perumahan Taman Telkomas Kota Makassar).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Zeliani, Rizqiana Alika, Aprilia Wahyu, and Ning Fitri. “Edukasi Pengolahan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pemanfaatan Sampah Sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 4, no. 7 (2026): 3567.